

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian pemborongan bangunan antara pemerintah dan swasta tunduk pada KUHPerdata, Undang-Undang No 28 Tahun 2002 berkaitan dengan penentuan objek perjanjian dan juga fungsi dari pembangunan objek perjanjian pemborongan tersebut, dan juga tunduk pada peraturan-peraturan standar lainnya diantaranya *Agtemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken in Indonesia*, selain itu sepanjang menyangkut pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan oleh penguasa cq departemen pekerjaan umum diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung) menyangkut segi yuridis dan teknisnya guna untuk mendorong pembangunan yang efektif dan berkualitas

B. Saran

Bagi para pihak dalam kegiatan pemborongan bangunan baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk dapat memahami makna dan substansi yang baik dan benar dalam perumusan dan pembuatan suatu perjanjian pemborongan bangunan antara Pemerintah dan Pihak Swasta

agar substansi dari perjanjian pemborongan bangunan yang dibuat dapat menggambarkan dengan jelas kehendak para pihak dalam perjanjian tersebut serta memnuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

F.X Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

1996, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*,
Rineka Cipta, Jakarta.

Edi As'Adi, 2011, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 95

Komar Andasmita, 1982, *Hukum Pemborongan Melakukan Pekerjaan Tertentu Perburuhan*,
Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.

R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung

---1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung

---1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia,

Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*,
Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta

Tirto Diningrat, 1966, *Ihtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta

Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang Diundangkan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Keppres 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan, yang Diundangkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138

Daftar Jurnal

HM. Hanfi Darwis, 2012, *Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan*, Jakarta

I Gusti Ngurah Anom, 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Denpasar.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 314/SKU/ADP/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Noviko Thaufik, ST**
Jabatan : General Superintendent PT. ANEKA DHARMA PERSADA
Alamat : Jl. Retno Dumilah No. 37a, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Mateus Maghu Ate**
NPM : 120511033
Universitas : Atmajaya Yogyakarta
Prodi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Yang bersangkutan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/skripsi telah melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan antara Pemerintah dan Swasta**" pada perusahaan kami PT. Aneka Dharma Persada yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi di wilayah D.I. Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2017

PT. ANEKA DHARMA PERSADA



ADP
PT. ANEKA DHARMA PERSADA
• GENERAL CONTRACTOR •

Noviko Thaufik, ST
General Superintendent



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
**BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)**

Jalan Ring Road Utara, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman
Telepon/Faximili (0274) 489622, e-mail : balaipipbjk@yahoo.co.id, Kode Pos 55281

SURAT KETERANGAN

Nomor : 073/01663

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROSDIANA PUJI LESTARI, S.T., M.Eng
NIP : 19690503 199303 2 006
Jabatan : Kepala Balai PIPBPJK Dinas PUP & ESDM DIY

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MATEUS MAGHU ATE
No Mahasiswa : 11033
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jurusan : Hukum

Yang bersangkutan dalam rangka Penulisan Hukum / Skripsi telah melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah dan Swasta"** pada Balai PIPBPJK Dinas PUP & ESDM DIY.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 25 Juli 2017

Kepala,



ROSDIANA PUJI LESTARI, S.T., M.Eng
NIP. 19690503 199303 2 006

α.